

**PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI BAGI  
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP  
ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ADI PRASSETIYO WIDODO**

**NPM 5116500007**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Adi Prasetyo Widodo

NPM 5116500007

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 17 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hamidah Abdurrahman  
NIDN 0022105601



Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H  
NIDN 060606600

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.  
NIDN 0615067604

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Adi Prasetyo Widodo  
NPM 5116500007

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 27 Januari

2020

Penguji I



Kus Rizkiyanto, S.H., M.H  
NIDN 0609068503

Penguji II



H. Dwijoyo Hartono, S.H., M.H  
NIDN 0616086401

Pembimbing I



Dr. Hamidah Abdurrahman  
NIDN 0022105601

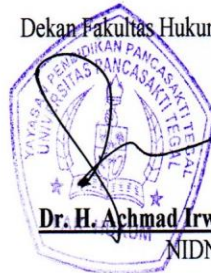
Pembimbing II



Dr. H. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H  
NIDN 060606600

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.  
NIDN 0615067604

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Prasetyo Widodo  
NPM : 5116500007  
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 29 Juli 1994  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI BAGI  
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP  
ANAK

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 28 Januari 2020



(Adi Prasetyo Widodo)

## ABSTRAK

Di Indonesia jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual menurut catatan resmi ILO (International Labour Organization) dan diperkuat oleh UNICEF (United Nation Children's Fund) mencapai 70.000 orang anak setiap tahunnya.. Penanganan pelaku kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dalam arti harus ada sistem pemberatan pidana yang efektif untuk dapat mengatasi persoalan kejahatan seksual terhadap anak.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaturan hukuman kebiri dalam hukum positif di Indonesia, (2) Untuk mengetahui penerapan hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Jenis Penelitian adalah penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan disertai dengan hasil penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, pengaturan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan hukuman kebiri di Indonesia sebenarnya masih mengalami pro dan kontra, namun dalam sistem pemberian pidana tambahan berupa kebiri hanya dilakukan untuk para pelaku kejahatan seksual dewasa. Pidana kebiri ini menjadi alternatif pidana terakhir (*ultimum remidium*) bagi pelaku pedofilia dan Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut masih anak-anak maka negara melalui Pasal 82 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan hukuman kebiri tidak berlaku. Pemberian hukuman kebiri ini hanya sebagai pilihan bagi hakim, bukan sebagai kewajiban.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

**Kata Kunci: Hukuman Kebiri, Kejahatan Seksual, Perlindungan Anak**

## ABSTRACT

*In Indonesia the number of children who are victims of sexual crimes according to official ILO (International Labor Organization) records and strengthened by UNICEF (United Nations Children's Fund) reaches 70,000 children each year. . The handling of perpetrators of sexual crimes requires multi-dimensional handling in the sense that there must be an effective criminal prosecution system to be able to overcome the problem of sexual crimes against children.*

*This study aims: (1) To determine the regulation of castration punishment in positive law in Indonesia, (2) To determine the application of castration law for sex offenders. This type of research is library research or library research, an empirical juridical approach, with data collection techniques through library research accompanied by the results of field research.*

*The results of this study indicate that in Indonesia, arrangements for castration are chemically listed in Act Number 17 of 2016 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The application of castration punishment in Indonesia actually still has pros and cons, but in the system of providing additional crimes in the form of castration only done for perpetrators of adult sexual crimes. Castration criminal becomes the last alternative criminal (ultimum remidium) for pedophiles and if the perpetrators of sexual crimes are still children then the state through Article 82 paragraph (8) of Law Number 17 Year 2016 states that the castration penalty does not apply. Granting castration punishment is only as an option for the judge, not as an obligation.*

*Based on the results of this study are expected to be material information and enter for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.*

**Keywords: Castration Punishment, Sexual Crime, Child Protection**

## **MOTTO**

- ❖ Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mendapatkan hikmah itu sesungguhnya ia telah kebajikan yang banyak. Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang berakal. **(Q.S Al-Baqarah: 269)**
- ❖ Dan bahwasanya setiap manusia itu tidak akan memperoleh (hasil) selain apa yang telah diusahakan. **(Q.S Al-Baqarah: 39)**
- ❖ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. **(Q.S Ar-Ra'ad:11)**

## **PERSEMBAHAN**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Dengan usaha dan perjuangan selama ini selama perkuliahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menyelesaikan skripsi saya namun itu semua tidak sebanding dengan usaha dan perjuangan dari ibu saya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perkuliahan saya. Dengan selesainya ini semua membantu meringankan beban ibu saya dan membuatnya sedikit tersenyum dan mengobati rasa lelahnya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Terimakasih kepada ibu saya Tanijah, walaupun seorang diri beliau selalu bisa memotivasi, memberi semangat tanpa henti dan selalu senantiasa mendo'akan, memperjuangkan dan mendukungku untuk meraih cita-cita saya tanpa henti.
- Almarhum Dirjo abahku yang selalu aku banggakan dan selalu jadi panutanku.
- Adiku Dita Agnestia Nurafni yang selalu aku sayangi.
- Ponakanku Faira Nurul Hidayah yang baru lahir sehingga memberiku semangat baru dalam hidup.
- Segenap keluarga besarku yang selalu memberikan bantuan dan motivasinya.
- Teman-teman yang selalu berjuang bersama dan saling menyemangati untuk menyelesaikan skripsi.
- Teman-teman seperjuangan yang hebat kompak dan solid kader-kader DPK Hukum GMNI Tegal. Bung dan Sarinah yang telah berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman dan arti tanggungjawab dalam sebuah organisasi serta pernah memberikan saya amanat sebagai Ketua DPK Hukum GMNI Tegal.
- Teman-teman Universitas Pancasakti Tegal lainnya.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT., *Alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang membawa rahmat untuk kita semua.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut di ucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada:

1. Dr. Burhan Eko Purwanto M.Hum., beliau selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani,S.H.I.,M.Ag., beliau selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Kanti Rahayu,S.H.,M.H, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Dr. H. Sanusi, SH.,MH, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Imam Asmarudin, SH.,MH., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Dr. Hamidah Abdurrachman,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Fajar Ari Sudewo,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II.
7. Tiyas Vika Widyastuti,S.H.,M.H., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal Shalih.

9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orangtua,serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dan menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membakas semua amal kebaikan mereka deengan balasan yang lebih dari mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal,28 Januari 2020

Adi Prassetiyo Widodo

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	18
A. Sejarah Hukum Kebiri.....	18

B. Pengaturan dan Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual .....	23
1. Pengaturan Tentang Kejahatan Seksual .....	23
2. Bentuk Kejahatan Seksual.....	27
C. Teori-Teori Pemidanaan.....	31
D. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak .....	35
E. Tinjauan Tentang Penerapan Hukum Kebiri dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia .....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Penerapan Hukuman Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia .....	47
B. Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual.....	58
BAB IV PENUTUP .....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan yang diatur dalam berbagai Undang-Undang negara, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bab ke-3 bagian kesepuluh pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara; serta ayat (2) yang menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak kandungannya.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kejahatan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan

umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.<sup>1</sup>

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau mene-

kan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya.<sup>2</sup>

Ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu: anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak

---

<sup>1</sup> Maslihah, S., "Play Therapy dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak", *Jurnal Penelitian Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)*, Volume 1, Nomor 01, Februari, 2013, hlm.21.

<sup>2</sup> Arini Fauziah Al haq,dkk., "Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia", *Jurnal FISIP-UNPAD*, Volume 2, Nomor 1, Maret, 2015, hlm. 16.

berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah.<sup>3</sup>

Di Indonesia jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual menurut catatan resmi ILO (*International Labour Organization*) dan diperkuat oleh UNICEF (*United Nation Children's Fund*) mencapai 70.000 orang anak setiap tahunnya.<sup>4</sup> Anak yang menjadi korban kekerasan seksual beberapa tahun ini terus meningkat. Huraerah dalam bukunya yang berjudul “Kekerasan Terhadap Anak” menjelaskan bahwa data tahun 2002 menunjukkan anak usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), di bandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%).<sup>5</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama kurun waktu 2018 tingkat kekerasan terhadap anak bertambah 300-an kasis disbanding tahun sebelumnya. Tahun 2018, KPAI mencatat ada 4.885 kasus kekerasan terhadap anak, bertambah 306 kasus dibanding pada tahun 2017 yang 4.579 kasus.<sup>6</sup>

Bertolak dari hal tersebut, sudah sewajarnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak diperhatikan secara tegas, langkah ini diproyeksikan agar mereka tidak merasa sendiri dan hukum berpihak kepada

---

<sup>3</sup> Diesmy Humaira B, dkk., “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak”, *Jurnal Psikologi Islam (JPI) Pusat Penelitian dan Layanan Psikologi*, Volume 12, Nomor 2, Agustus, 2015, hlm. 23.

<sup>4</sup> <http://mappifhui.org/2016/03/01/menguji-euforia-kebiri-catatan-kritis-atas-rencanakebijakankebiri-chemical-castration-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-anak-di-indonesia> diakses pada : 16 Oktober 2019

<sup>5</sup> Abu Huraerah, “Kekerasan Terhadap Anak”, Bandung: Nuansa, 2012, hlm.22.

<sup>6</sup> <https://jabar.tribunnews.com/2019/01/18/angka-kekerasan-terhadap-anak-selama-2018-meningkat-ada-pertambahan-sekitar-300-kasus> diakses pada 14 Januari 2020

mereka. Penanganan pelaku kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dalam arti harus ada sistem pemberatan pidana yang efektif untuk dapat mengatasi persoalan kejahatan seksual terhadap anak. Melatarbelakangi persoalan tersebut, pada tanggal 25 Mei 2016 pemerintah melalui Presiden Joko Widodo melakukan pembaruan hukum dengan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri sebagai pidana tambahan.<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia secara tegas Mengesahkan dan Memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Diundangkan Di Jakarta 25 Mei 2016). Pada Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>8</sup>

Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU Nomor 1 Tahun 2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>7</sup> Yuriswanto, Adam, dan Ahmad Mahyani, “Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 27, Februari, 2018, hlm. 12.

<sup>8</sup>Tim Visi Yustitia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI NO. 23/2002 dan UU RI NO. 35/2014)*, Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 2016, hlm. 34



Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 memuat tentang Pemberatan hukuman berupa Kebiri Kimia pada pelaku kejahatan seksual pada anak yang tercantum dalam Pasal 81 angka (7) menyatakan “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pelaku paedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang memengaruhi dorongan seksualnya.<sup>9</sup>

Pengesahan dan pemberlakuan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentunya menuai Pro-kontra. Pihak yang pro berargumen hukuman kebiri diperlukan karena kasus kekerasan seksual sudah dalam tahap darurat. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pemberatan hukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak terlalu efektif dalam mengurangi perbuatan-perbuatan tidak senonoh terhadap anak. Terbukti, rata-rata vonis terhadap pelaku masih tergolong ringan. Sehingga hal tersebut belum

---

<sup>9</sup> Muhammad Andi Dirgantara, Syafruddin Kallo, dkk., “Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia”, *USU Law Journal*, Volume 5, Nomor 1, September, 2017, hlm. 24.

berhasil menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Akhirnya, kasus-kasus yang sama, bahkan yang lebih keji masih saja marak di negara ini.<sup>10</sup>

Pertimbangan lainnya, bahwa kejahatan seksual pada anak dibawah umur merupakan kejahatan yang sifatnya *Ekstra-Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, apa lagi hingga menyebabkan korban meninggal dunia.<sup>11</sup>Kejahatan seksualitas pada anak dibawah umur juga dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, hal ini dikarenakan anak dibawah umur seharusnya menikmati hak-hak mutlaknya sebagai seorang anak seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pihak yang kontra menolak hukuman kebiri berdasarkan beberapa argumen. Ada yang menolak karena mempertanyakan efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera. Tujuan dari pemberatan hukuman pasti berupaya supaya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan serupa.

---

<sup>10</sup> Arliman, Laurensius S, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 1, Nomor 2, Maret, 2017, hlm. 19.

<sup>11</sup>Paat, Alfando, “Relevansi Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 5, Maret, 2017, hlm. 48

Perppu Perlindungan Anak dinilai belum tepat untuk saat ini. Setidaknya ada beberapa alasan. Pertama, eksistensi negara tidak tergantung dari Perpu yang akan dikeluarkan. Bisa dipastikan bahwa tanpa Perpu Perlindungan Anak tersebut, eksistensi republik ini masih tetap terjaga. Kasus kekerasan seksual terhadap anak memang bukan perkara biasa, namun hal tersebut tidak boleh dipandang sebagai krisis yang menimbulkan penghambatan secara nyata terhadap keberlangsungan negara dan kinerja pemerintahan. Kedua, tindakan mengeluarkan Perpu Perlindungan Anak masih bisa digantikan dengan tindakan lain, seperti pembedaan Undang-Undang. Ketiga, keluarnya Perpu dapat dinilai dari aspek latar belakang dan implikasinya. Jika ihwal kepentingan Perpu Perlindungan Anak ini masih perdebatan, maka implikasi yang ditimbulkan juga tidak signifikan.<sup>12</sup>

Perpu Perlindungan Anak ini belum mampu menjawab tuntutan pencegahan secara komprehensif kekerasan seksual terhadap anak. Perpu sebagai senjata pamungkas yang materinya hanya berfokus pada pemberatan hukuman adalah tindakan yang tidak terlalu efektif. Sesungguhnya, alangkah baik jika materi Perpu tersebut mengatur 3 (tiga) hal yang menjadi tonggak utama penegakan hukum. Selain mengatur mengenai materi (substansi) hukumnya, Perpu ini lebih baik kalau mengatur juga perihal aparat hukum dan budaya hukum masyarakat dalam perlindungan anak. Sesungguhnya DPR masih punya waktu dan kesempatan untuk melakukan Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak yang lebih komprehensif, yang dibutuhkan adalah

---

<sup>12</sup>Arliman, Laurensius S, *Op.Cit.*, hlm. 186

niat baik dan tulus dari Presiden dan DPR untuk menyelamatkan generasi bangsa. Dengan pembahasan yang lebih terarah, diharapkan produk yang dihasilkan pun akan lebih solutif dalam perlindungan anak.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dikarenakan berkaitan erat dengan pengaturan hukuman kebiri dalam hukum positif Indonesia dan penerapannya bagi pelaku kejahatan seksual yang kemudian dikemukakan dalam judul **“Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dipaparkan di atas, maka perumusan masalahnya ialah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hukuman kebiri dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji pengaturan hukuman kebiri dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisa penerapan hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 16

Berdasarkan tujuan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih gagasan konseptual mengenai pengaturan tentang hukuman kebiri dalam hukum positif.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam memberikan analisa mengenai penerapan hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.
- c. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai pengaturan tentang hukuman kebiri dalam hukum positif dan penerapan hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual sehingga peneliti mendapat suatu pengalaman antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan gagasan konseptual yang ada kenyataan di lapangan.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah informasi mengenai pengaturan tentang hukuman kebiri dalam hukum positif dan penerapan hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

### c. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan kajian bagi pemerintah khususnya pemangku kepentingan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

## E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang relevan dan dapat dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut.

1. Nur Hafizal Hasanah dan Eko Soponyono (2019), Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pemberian hukuman melalui pengelibiran dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Pengenaan sanksi kebiri bagi pelaku perkosaan di berbagai negara di dunia menunjukkan bahwa tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hukuman kebiri kimia seakan telah melanggar hak asasi manusia.

Penggunaan upaya hukum pidana adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan

hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Arliman, Laurensius S (2019), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU 1 Tahun 2016 sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu Anak adalah pelaku kekerasan seksual masih mengancam masyarakat meski ancaman hukum telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi ini tidak memberikan jera, karena anak selalu dibayangi pelaku kejahatan.

Pro-kontra hukuman kebiri muncul setelah pemerintah berencana menerapkan hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Pihak yang pro berargumen hukuman kebiri diperlukan karena kasus kekerasan seksual sudah dalam tahap darurat. Sementara pihak yang kontra menolak hukuman kebiri berdasarkan beberapa argumen. Ada yang menolak karena mempertanyakan efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera dan itu merupakan pelanggaran HAM.

3. Paat, Alfando (2019), Relevansi Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahata Seksual Pada Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Relevansi hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak dibawah umur dapat di lihat dari keseimbangan antara hak asasi dan kewajiban asasi, terlebih

khusus dari sudut pandang pelaku kejahatan (terpidana). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, memuat ketentuan tentang tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik pada terpidana.

Bertitik-tolak dari pembahasan pada rumusan masalah pertama, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan tindakan kebiri kimia atau kastrasi dapat dilaksanakan dan harus dilaksanakan di Indonesia karena telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan oleh Pemerintah Indonesia penerapan kebiri kimia berbanding lurus antara perbuatan dan hukuman. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai mana telah di tetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

4. Aditia Arief Firmanto (2017), Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkanya Perppu Nomor 1 Tahun 2016).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ketentuan Pasal 81 Ayat 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi jenis Pemidanaan baru di Indonesia yaitu Pidana Kebiri yang termasuk dalam Pidana Tindakan. Pidana kebiri ini menjadi alternatif pidana terakhir



(ultimum remedium) bagi pelaku pedofilia. Hal ini relevan dilakukan karena dengan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, agar memberikan efek jera bagi pelaku pedofilia dan pemulihan kepada pelaku pedofilia agar tidak mengulangi kejahatan yang sama. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dari Teori Gabungan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, namun juga memberikan pembinaan dan pemulihan kepada pelaku pedofilia serta mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak berbuat tindak pidana tersebut. Sementara itu, eksekutor terhadap terpidana kebiri dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui dokter kepolisian (dokpol). Pertanggungjawaban Dokpol bukan terhadap Ikatan Dokter Indonesia melainkan kepada Negara.

Permasalahan yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tentang hukuman kebiri dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana penerapan hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup> Maka menurut penulis, metodologi penelitian merupakan prosedur dan teknik dalam penelitian yang dapat menganalisis permasalahan hukum yang sedang ditulis oleh penulis sehingga dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode penelitian demi tercapainya tujuan penelitian yang penulis rumuskan.

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm. 35

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grandmethode* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yang telah disebutkan, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*”.<sup>15</sup> Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.<sup>16</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan cara mempelajari pandangan-

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm.23

<sup>16</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm.46

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argument hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

### 3. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun bahan hukum primer dan sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

#### 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah jurnal-jurnal dan buku teks yang terkait dengan kekerasan seksual pada anak.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis.

Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Metode analisis data

Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode deduktif. Pola berfikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu hukum yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor merupakan

fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan suatu aturan hukum.

Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal tersebut terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan didalam penulisan, yaitu :

#### **A. Bab I Pendahuluan**

Bab I menguraikan tentang : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

#### **B. Bab II Tinjauan Konseptual**

Bab II menguraikan tentang : Sejarah hukum kebiri, Pengaturan dan bentuk-bentuk kejahatan seksual, Teori-teori pemidanaan, Ketentuan pidana dalam undang-undang perlindungan anak, Tinjauan tentang penerapan hukum kebiri dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

#### **C. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan hasil rumusan masalah tentang pengaturan hukuman kebiri dalam hukum positif di Indonesia, dan penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

#### **D. IV Penutup**

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KONSEPTUAL**

#### **A. Sejarah Hukum Kebiri**

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006, menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.<sup>17</sup>

Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis pengebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman.

---

<sup>17</sup> Mardiya, Nuzul Qur'aini, *Op.Cit.*, hlm. 217.

Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofili sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya.

Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.

Pengaruh kebiri kimia ini tidak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cypoterone acetate* (CPA).<sup>13</sup> Pengaruh obat ini ada dalam rentang 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah hormon testosteron.

Beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang yang mengatur tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya, Argentina (2010),

Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012), dan Estonia (2012).<sup>18</sup>

Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, diketahui mempunyai dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kepadatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Di Rusia prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat *depoprovera* yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh si pesakitan. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia akan menjalani hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.<sup>19</sup>

Di Korea Selatan, Pemerintah menggunakan metode kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan

---

<sup>18</sup><http://mckinneylaw.iu.edu/ihr/pdf/vol5p87.pdf> & <http://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html>. diakses pada 17 Oktober 2019

<sup>19</sup><http://jateng.tribunnews.com/2016/05/17/apa-itu-hukum-kebiri-dan-apa-bedanya-kebiri-fisik-dan-kebiri-kimiawi-ini-penjelasan?page=3> diakses pada tanggal 15 November 2019



dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri.

Di semua negara yang menerapkan hukum kebiri, pemerkosa yang diberi hukuman pemberatan (kebiri) tetap menjalani hukuman kurungan badan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Meskipun beberapa Negara Eropa tersebut di atas sudah memasukkan pasal hukuman atau tindakan kebiri dalam hukum pidananya, namun hukum acara yang mengatur mekanisme penerapan pasal tersebut mengalami kesulitan, karena sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan diagnosa, karena tidak semua pelaku harus dikebiri, tetapi harus dicek dan diagnosa lebih dahulu kesehatan dan implikasi medisnya.

Aturan pidana di negara Eropa mensyaratkan adanya usia minimum untuk penerapan hukuman kebiri fisik atau kimiawi, usia yang disyaratkan untuk menjalani prosedur ini berkisar 14 – 21 tahun dimana pelaku yang akan menjalani prosedur pun tidak boleh dipaksa untuk menjalaninya ataupun diberikan pilihan apabila tidak menjalani prosedur kebiri akan menjalani hukuman penjara yang lebih lama.

Negara bagian California merupakan negara bagian AS pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin.

Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimia bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari treatment dan bukan punishment. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxyprogesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level *testosteron* yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh *The Food and Drug Administration*, alasan yang dikemukakan oleh FDA adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impoten. Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak impoten, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.

Para pengkritik hukuman kebiri menyatakan bila proses kebiri telah melanggar hak asasi manusia, dan efek samping yang didapatkan adalah penderitaan yang menyakitkan dan untuk jangka waktu panjang yakni salah

satunya osteoporosis. John Stinneford, seorang profesor hukum yang berasal dari Universitas Florida menyatakan, “subjek dari kebiri kimiawi akan mengalami proses yang disebutnya ‘melumpuhkan organ’ dan dapat disebut sebagai suatu penyiksaan. Dalam tulisan yang sama, dia menyatakan bila kebiri kimiawi adalah tindakan yang kejam dan merupakan hukuman yang tidak biasa, karena melanggar Amandemen Ke-8 dari Konstitusi Amerika Serikat.”<sup>20</sup>

Putusan Pengadilan menyatakan *treatment* kebiri diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual anak yang paling serius dan memiliki kecenderungan untuk mengulangi kejahatannya. Persyaratan untuk memberikan *treatment* ini pun sangatlah ketat, karena ternyata hasil penelitian medis menemukan efek samping atas *treatment* ini diantaranya menimbulkan ketagihan/kecanduan, migrant, sakit kepala yang berkepanjangan dan bahkan dapat menimbulkan diabetes.

## **B. Pengaturan dan Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual**

### **1. Pengaturan tentang Kejahatan Seksual**

Buku Ke-II KUHP dan aturan-aturan lain di luar KUHP mengatur tentang perbuatan pidana dalam hukum pidana yaitu kejahatan. Perbuatan pidana itu juga meliputi tindakan pelanggaran-pelanggaran. Ini berarti, kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja melainkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau kerugian bagi orang lain.

---

<sup>20</sup> L.H. Spalding, “Florida’s 1997 Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages.” Florida State Law Review, 1998, 25: 117-139(<http://www.neulaw.org/blog/1034-class-blog/4070-mpa-a-the-chemical-castration-of-sex-offenders>) Diakses pada tanggal 25 November 2019

Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual (pemeriksaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.

Kekerasan seksual merupakan isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid.

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada,

sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.<sup>21</sup>

Dari perspektif yuridis, yang merujuk pada ketentuan KUHP tidak ditemukan definisi secara jelas mengenai kejahatan kekerasan, akan tetapi hanya disebutkan dalam Pasal 89 : membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dari rumusan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang berakibat pingsan dan tidak berdaya. Dengan berkembangnya jaman, pemahaman kekerasan dapat dilakukan dengan ancaman (psikologis) dan tindakan nyata (fisik).

Regulasi mengenai kejahatan di Indonesia diatur dalam peraturan yang telah dikodifikasi yaitu KUHP. Terdapat dua jenis tindak pidana perkosaan dalam KUHP, yaitu : (1) Pasal 285 diatur mengenai tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh; (2) Pasal 289 mengatur mengenai tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul. Ratna Batara Munti dalam artikel berjudul “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas” menyatakan antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP, menurutnya, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R. Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai

---

<sup>21</sup> Ni Made Dwi Kristiani, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali*, Volume 7, Nomor 3, 2014, hlm. 372.

perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan atau korbannya adalah anak-anak dan itu berupa persetubuhan diawali dengan kekerasan memaksa anak, maka perbuatan tersebut melanggar pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; dan jika berupa perbuatan cabul dan diawali dengan kekerasan memaksa anak atau melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau dengan bujuk rayuan terlebih dahulu, maka perbuatan tersebut melanggar pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harrasment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* (Martin Eskenazi and David gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*".<sup>22</sup>

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran, atau ditempat-tempat tertentu yang memberikan

---

<sup>22</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13746/pelecehan-seks/> diakses pada 14 Januari 2020

peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.<sup>23</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Bentuk-bentuk kejahatan seksual umumnya dilakukan dengan upaya memaksa keinginan salah satu pihak saja untuk merayu, mencolek, memeluk, meremas bagian tubuh, dan segala macam bentuk pelecehan lainnya hingga tujuan utamanya adalah melakukan persetubuhan paksa. Di Indonesia terdapat beberapa Undang-undang yang menyangkut kejahatan seksual, serta ketentuan dalam KUHP yang menyangkut kekerasan seksual dapat dilihat pada BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan beberapa Undang-undang lainnya.

Bentuk-bentuk kejahatan seksual adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

### a) Perkosaan

Pertama, Perkosaan. Perkosaan bisa dimaknai sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, dalam serangan seksual itu

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Iqbal Ramdhani, "Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat", Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 4, Nomor 1, 2017, hlm. 101

ada upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan, dalam perkosaan terdapat unsur pemaksaan terhadap korban membuat pihak wanita merasa dirugikan, maka dalam pasal 285 KUHP menyebutkan “barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan laki-laki diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Perkosaan selalu identik dengan persetubuhan yang dipaksakan, persetubuhan sendiri menurut rumusan KUHP adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan. Pengertian persetubuhan tersebut masih merupakan pengertian aliran klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika hal tersebut masih dianggap sebagai percobaan.

b) Pelecehan Seksual

Kedua, Pelecehan Seksual. Pelecehan seksual ini adalah tindakan lewat sentuhan fisik atau nonfisik, yang sengaja atau berulang-ulang,



atau hubungan fisik yang bersifat seksual bukan suka sama suka. Namun pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang oleh korbannya dirasa tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghinakan atau tidak menghargai dengan membuat seorang sebagai obyek pelampiasan seksual. Dalam KUHP tidak ada pasal yang menjelaskan secara langsung pelecehan seksual tetapi kejahatan seksual itu sudah terangkum dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 tentang pencabulan KUHP, karena perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan dan termasuk kedalam kejahatan kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan atau kesusilaan bisa dimasukan kedalam perbuatan cabul, dengan demikian pelecehan seksual adalah adanya ketidainginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Pelecehan seksual ini dapat dijerat dengan pasal percabulan pasal 289 sampai pasal 296 KUHP.

c) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, atau untuk memperoleh keuntungan. Bentuk yang kerap terjadi adalah menggunakan kemiskinan keluarga perempuan untuk memasukkannya kedalam prostitusi atau bisnis pornografi. Terkait kejahatan seksual

bentuk eksploitasi ini di atur dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

d) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual ini meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual. Kejahatan diatas tercantum dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 pasal 1 angka 1 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, “Tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaa kekerasan, pengekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utan atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antar negara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

e) Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual adalah situasi diman pelaku merasa menjadi ‘pemilik’ atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau cara lain. Dalam kasus perbudakan seksual diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, dalam penjelasan umum dijelaskan definisi perbudakan sebagai berikut. “Perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.”

### C. Teori-Teori Pidanaaan

Teori-teori pidanaaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidanaaan

mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>25</sup> Berikut penjelasan tentang teori-teori pemidanaan :

#### 1. Teori absolut (teori retributif)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>26</sup> Setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>27</sup> Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat apa yang ditimbulkan dan apakah masyarakat dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>28</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>29</sup> Tujuan pemidanaan tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelaku.

---

<sup>25</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 22.

<sup>26</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1992, hal. 12

<sup>28</sup> Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 24

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 90

## 2. Teori relatif (*deterrence*)

Teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>30</sup> Dengan kata lain, pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku orang yang melakukan kejahatan dan orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>31</sup>

## 3. Teori gabungan (integratif)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si

---

<sup>30</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hal 106

<sup>31</sup> Dwija Priyanto, *Op.Cit.*, hal 26

penjahat.<sup>32</sup>Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

#### 4. Teori *Treatment*

Teori ini mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Aliran ini beranggapan bahwa manusia tidak memiliki kehendak yang bebas, perilakunya dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kondisi sosial lingkungannya. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus bersifat mendidik, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>34</sup>*Treatment* ini berupa perawatan untuk merekonsiliasi pelaku kejahatan agar menjadi manusia yang baik.

---

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal 107

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 106

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hal.96-97

#### 5. Teori perlindungan sosial (*social defence*)

Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>35</sup>

#### **D. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak, mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur lebih spesifik dan lebih melindungi kepentingan bagi anak. Seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun. Berikut ini adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

TINDAK KEJAHATAN	PASAL

---

<sup>35</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hal.98

1. Mendiskriminasi anak	<p>1. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau</li> <li>2. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Pasal 76A dimaksud adalah Setiap orang dilarang : <p style="text-align: center;">Pasal 77A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 77B</p> <p>Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Pasal 76B ialah Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.</p> </li></ol>
2. Kekerasan terhadap anak	<p>2. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, yaitu Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta</li> </ol>



	<p>melakukan Kekerasan terhadap Anak, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).</p> <p>2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).</p> <p>3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).</p> <p>4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.</p>
<p>3. Kekesaran seksual terhadap anak</p>	<p>3. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yakni Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).</p> <p>2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.</p> <p>3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
<p>4. Perbuatan cabul</p>	<p>4. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014</p>

terhadap anak	<p>tentang Perlindungan Anak</p> <p>Pasal 82</p> <p>1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E adalah Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).</p> <p>2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
5. Perdagangan anak	<p>5. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014</p> <p>tentang Perlindungan Anak</p> <p>Pasal 83</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F, yakni Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).</p>
6. Menghalangi hak anak	<p>6. Pasal 86A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014</p> <p>tentang Perlindungan Anak</p> <p>Pasal 86A</p> <p>Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G, yaitu Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya, maka dipidana dengan pidana</p>

	penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
7. Memperalat anak	<p>7. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H, yakni Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).</p>
8. Eksploitasi terhadap anak	<p>8. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, yakni Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).</p>
9. Melibatkan anak dalam narkoba dan alcohol	<p>9. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), yakni Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika, maka dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara</p>

	<p>paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).</p> <p>2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), yakni Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).</p>
--	--

#### **E. Tinjauan Tentang Penerapan Hukum Kebiri dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia**

Hukum pidana merupakan suatu usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi. Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal itu berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa bersangkutan. Tidak salah kiranya, kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa.<sup>36</sup>

Pelaksanaan hukum kebiru kimia yaitu dengan menyuntikkan ke tubuh manusia sehingga membuat nafsunya menjadi berkurang atau bahkan hilang. Perbuatan tersebut tentu melanggar kodrat manusia dan membuat pelaku justru menjadi tersiksa. Tujuan hukum pidana di era modern sekarang ini tidak lagi

---

<sup>36</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977, hlm.49.

berorientasi pada pembalasan, akan tetapi membuat pelaku dan korban bisa sama-sama mendapatkan keadilan. Berbicara mengenai tujuan hukum pidana tidaklah mungkin terlepas dari aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana. Bertolak belakang dengan aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan berkehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.<sup>37</sup>

Pertimbangan nilai merupakan suatu yang harus menjadi pertimbangan dalam merumuskan suatu tindak pidana. Harus dilakukan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan (2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>38</sup>

Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan hukum kebiri kimia juga tidak berdampak apapun bagi korban tindak pidana. Padahal menurut Hart, fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain.<sup>39</sup> Negara

---

<sup>37</sup> Arief, B. N., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), cet. ke-4. Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 76

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 30

<sup>39</sup> Hiariej, E. O., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm.29

dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh sebab itu, pembedaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.<sup>40</sup>

Sistem pemberian pidana tambahan berupa kebiri hanya dilakukan untuk para pelaku kejahatan seksual dewasa. Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut masih anak-anak maka negara melalui Pasal 82 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan hukuman kebiri tidak berlaku. Pemberian hukuman terhadap anak-anak sebagai pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan melalui beberapa pasal yang lain yang ada dalam undang-undang perlindungan anak. Pengkhususan tersebut mengingat usia anak yang masih dibawah umur.<sup>41</sup>

Pembedaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Pembedaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Menurut Satohid Kartanegara terdapat 3 (tiga) teori tujuan pembedaan, yaitu *absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergeldings*/imbalan, pembalasan), *relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud,tujuan) dan *vereningings theorieen* (teori gabungan).<sup>42</sup> Sejauh ini, belum ada hukum positif di Indonesia secara

---

<sup>40</sup> Wahyuni, F., "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (Jurnal Media Hukum)*, Volume 23, Nomor 1, Juni, 2016, hlm.99

<sup>41</sup> Adam Yuriswanto dan Ahmad Mahyani,"Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Volume 14, Nomor 27, September, 2018, hlm.33.

<sup>42</sup> Kartanegara, Satohid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001, hlm.56.

eksplisit menyatakan tentang teori tujuan pemidanaan apa yang dianut oleh Indonesia. P.A.F. Lamintang menyatakan tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Pendapat P.A.F . Lamintang yang pada dasarnya bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya semata-mata untuk membuat pelaku jera atas tindakan yang dilakukan namun tujuan kedepannya yaitu untuk memperbaiki pribadi pelaku itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka teori tujuan pemidanaan yang dianut Indonesia adalah teori gabungan, walaupun secara eksplisit belum ada hukum positif yang menyatakan demikian. Bagian dari teori absolute yang diterapkan di Indonesia adalah adanya asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP serta jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP. Sedangkan bagian dari teori relative yang diterapkan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasysarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasysarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Jika dikaitkan dengan wacana penerapan hukuman kebiri, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak karena

kekerasan seksual pada anak atau pedophilia itu merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak menysar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat 7 Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi jenis Pidanaan baru di Indonesia yaitu Pidana Kebiri yang termasuk dalam Pidana Tindakan. Pidana kebiri ini menjadi alternatif pidana terakhir (*ultimum remidium*) bagi pelaku pedofilia. Hal ini relevan dilakukan karena dengan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia, agar memberikan efek jera bagi pelaku pedofilia dan pemulihan kepada pelaku pedofilia agar tidak mengulangi kejahatan yang sama.

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka ada kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak



kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 294, serta Pasal 298.<sup>43</sup>

Sanksi pidana secara eksplisit diatur pada Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sendiri ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Hukuman kebiri tidak tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, yang berarti bahwa hukuman kebiri tidak termasuk dalam sistem pidana Indonesia. Selain itu, hukuman kebiri melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.

Kedudukan Pidana kebiri dalam sistem pidana di Indonesia bukanlah sebagai pidana pokok, tambahan maupun pemberatan, namun termasuk dalam pidana tindakan. Pasal 81 ayat 7 Perppu No. 1 Tahun 2016 menegaskan, “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”. Bunyi dari Pasal 81 ayat 7 tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah, sebab

---

<sup>43</sup> Mardiya, Nuzul Qur’aini, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, Jurnal Konstitusi Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI Volume 14, Nomor 1, Maret, 2017, hlm. 217.

ujukannya yang dapat dikenai pidana tindakan bagi pelaku pedofilia harus dilihat kembali pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 4 dan ayat 5.

Ketentuan ini pada intinya mengatur jenis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan siapa pelaku (ayat 4) dan akibat dari perbuatan petindaknya (ayat 5). Jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak ternyata seorang residivis, maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia. Hal demikian juga berlaku pada pelaku yang berdasarkan akibat dari perbuatan pelaku, yakni menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, kepada pelaku ini dikenakan pidana tindakan kebiri kimia.

Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dari Teori Gabungan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, namun juga memberikan pembinaan dan pemulihan kepada pelaku pedofilia serta mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak berbuat tindak pidana tersebut. Sementara itu, eksekutor terhadap terpidana kebiri dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui dokter kepolisian (dokpol). Pertanggungjawaban Dokpol bukan terhadap Ikatan Dokter Indonesia melainkan kepada Negara.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukuman Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia**

Laporan *World Rape Statistic* Tahun 2012 menunjukkan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan di berbagai negara di dunia tidak efektif menimbulkan efek jera. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa penggunaan kebiri kimia telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seiring dengan peradaban HAM, kebiri kimia diterapkan hanya sebagai bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui pelaku tindakan kekerasan seksual, dimana pelaku bersedia untuk melakukan hal tersebut berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis. Hal inilah yang saat ini masih diterapkan di Inggris, Jerman, Australia, Denmark, dan Swedia.

Menakar efektivitas tindakan intervensi dengan memberikan suntikan kimiawi *medroxyprogesterone acetate* (MPA) (Amerika Serikat) atau *Cyproterone acetate* (CPA) (Eropa, misalnya Androcur) terhadap pelaku kejahatan seksual tidak bisa serta-merta digeneralisasi dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Faktor-faktor yang berkaitan dengan metodologi dari satu riset tertentu perlu diperhatikan sedemikian ketatnya sebelum menyimpulkan satu tindakan tertentu efektif menurunkan tingkat residivitas pelaku kejahatan seksual. Kastrasi memang dapat menurunkan dorongan seksual pada pelaku kejahatan seksual, namun demikian jika

dilakukan pengebirian dengan penghilangan testis, maka akan menghilangkan organ secara permanen. Di samping itu walaupun akan turun secara drastis dorongan seksualnya, masih dapat kembali apabila suntikan kimia *treatment* dihentikan, karena masih adanya faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual.

Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya. Walaupun secara medis memberi dampak penurunan dorongan seksual, namun harus dikaji secara mendalam, dampak sosial dan psikologis pada pelaku yang dikebiri sehingga diperlukan pendampingan psikologis dan sosial terhadap pelaku selama dan setelah menjalani masa hukumannya.<sup>44</sup>

Kesulitan menemukan faktor pencetus dan treatment yang tepat terhadap pelaku kejahatan seksual adalah kesulitan metodologis yang harus menerapkan desain eksperimental. Sampel hanya terbatas pada pelaku yang sedang menjalani hukuman. Guna memberlakukan suatu hukuman pemberatan untuk pelaku kejahatan seksual dan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat, tidak boleh hanya didasari oleh pertimbangan emosional, common sense, pencitraan, melayani tuntutan publik yang lebih banyak merupakan pertimbangan emosional. Bagi ilmuwan, praktisi tenaga kesehatan, dan aparaturnya penegak hukum setiap

---

<sup>44</sup><http://serendip.brynmawr.edu/exchange/serendipupdate/chemical-castration-benefits-and-disadvantages-intrinsic-injecting-male-pedophiliacs> Diakses pada tanggal 12 November 2019

pertimbangan atau rekomendasi haruslah didasarkan pertimbangan ilmiah yang ditandai adanya kesesuaian antara gagasan dengan fakta dan sekaligus merupakan pelaksanaan amanah konsitusi yakni melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai berikut:

#### Ketentuan Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,

aparatus yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
6. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;

9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
3. Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh

lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.



Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi kebiri kimiawi melalui proses yang panjang dicantumkan pada pasal 81, pasal 82 dan pasal 81A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai hukuman tambahan dan itu bisa menjadi pilihan bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim sebagai pengadil di dalam persidangan untuk memberikan hukuman dengan tujuan efek jera untuk para pelaku, sanksi kebiri kimiawi di anggap sesuai dengan tujuan pembedaan sanksi pidana merupakan salah satu cara yang di gunakan untuk mencapai tujuan diadakannya hukuman pidana.

Dalam hal ini ada tiga teori yang terkait pembedaan, yaitu:Teori Absolut, Teori Relatif dan Teori Gabungan. Hukuman kebiri dapat disimpulkan termasuk ke dalam teori gabungan. Di satu sisi hukuman

kebiri sebagai pembalasan dan bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Di lain sisi hukuman kebiri juga dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut dan sekaligus memberikan efek jera.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sudah menerapkan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang telah disinkronisasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuannya adalah untuk melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan dan anak yang menjadi korban kejahatan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU 1 Tahun 2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Penerapan tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 muncul pendapat berbeda dinyatakan oleh para tenaga medis.

Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila<sup>45</sup>, pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen. Kebiri secara kimiawi dapat merusak bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya. Menurutnya, sejauh ini tidak ada data yang mendukung apabila penerapan kebiri secara kimiawi bisa memberi efek jera lebih dari hukuman yang ada.

Menurut Dr. Arry Rodjani, SpU21, seorang urolog, biaya untuk menyediakan suntikan kebiri kimiawi sebesar Rp. 700.000,00 – Rp. 1.000.000,00 untuk sekali pemakaian, dan efek suntikannya dapat bertahan dari 1 – 3 bulan. Menurutnya, biaya tersebut mahal dan tidak efektif. Selain itu dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menyatakan penolakannya menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak. Hal ini menurut IDI dikarenakan pelaksanaan hukuman kebiri oleh dokter dianggap melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.<sup>46</sup>

Peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai larangan penerapan hukuman yang melanggar hak asasi manusia. Seperti yang diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

---

<sup>45</sup><http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>. Diakses pada tanggal 14 November 2019

<sup>46</sup>[http://www.antaraneews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm\\_source=related\\_news&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news](http://www.antaraneews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news). . Diakses pada tanggal 24 November 2019

1998<sup>47</sup> tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) menyatakan bahwa setiap negara di wilayah yurisdiksinya berkewajiban untuk mencegah segala bentuk kekejaman, perlakuan tidak manusiawi, dan segala bentuk perlakuan atau penghukuman yang dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan sebagaimana tercantum dalam definisi Pasal 1.

Senada dengan aturan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998, Pasal 7 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)<sup>48</sup> menyatakan:

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”

Indonesia selaku negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT, memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi ketentuan larangan untuk tindakan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, serta segala bentuk perlakuan dan sanksi yang merendahkan martabat manusia. Apabila Indonesia menerapkan sanksi kebiri secara

---

<sup>47</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.

<sup>48</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

kimiawi dan tanpa adanya persetujuan yang diberikan secara bebas oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual maka hal demikian dianggap telah melanggar kewajiban yang tertera dalam dokumen ICCPR dan CAT.

Diantara pro dan kontra tentang pelaksanaan kebiri kimiawi yang melanggar hak asasi manusia dan pertimbangan medis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentunya telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal yang masih perlu dijelaskan dalam pelaksanaan kebiri kimiawi adalah persetujuan dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Pelaku haruslah diinformasikan secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek kebiri kimiawi untuk kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya sedikit pun paksaan akan adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara. Dan yang terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum dan sesudah pelaksanaan kebiri kimiawi dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan obat-obatan untuk melaksanakan kebiri kimiawi.

Penerapan kebiri kimiawi tentunya telah mempertimbangkan aspek ‘perlindungan’ untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebiri kimiawi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis yang baik. Bila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogianya

dalam pelaksanaan kebiri kimiawi kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama.

Pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya pencegahan dan memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual yang berulang, menyiapkan aturan pelaksana teknis pelaksanaan hukuman tambahan kebiri secara kimiawi, sarana prasarana, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan dan psikolog yang mendampingi pelaku yang akan menjalani prosedur kebiri kimiawi, dan anggaran untuk melaksanakan kebiri kimiawi secara berkesinambungan. Pemantauan putusan pengadilan untuk mengawal pelaksanaan kebiri secara kimiawi dengan berkoordinasi antar kementerian yang bertanggungjawab di bidang hukum, sosial, dan kesehatan agar tujuan pembedaan tersebut menjadi tepat sasaran yakni mencegah kejahatan kekerasan seksual berulang dan membuat efek jera para pelakunya.

## **B. Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak**

### **1. Kasus Kejahatan Seksual (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.)**

Aris ditangkap pihak kepolisian pada Oktober 2018 setelah dilaporkan orangtua bocah yang menjadi korban perbuatannya. Aksi keji Aris kepada bocah yang masih TK tersebut dilakukan selepas ia pulang kerja. Aris yang bertemu korban yang sedang bermain sendirian di depan rumah kemudian menarik paksa korban ke rumah kosong tak

jauh dari rumah korban. Setelah mendapat laporan dari orangtua korban, polisi yang menemukan petunjuk dari rekaman CCTV di gang rumah korban kemudian secara mudah menangkap pelaku yang berasal dari Dusun Mengelo, Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Setelah dilakukan penyidikan dia berterus terang sudah melakukan ke 11 anak, Kepada penyidik Aris juga mengaku sudah melakukan kejahatannya selama tiga tahun.<sup>49</sup>

Humas Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Erhamudin, mengatakan, perkara atas nama Aris telah terdaftar di Kabupaten dan kota Mojokerto. Terdapat dua perkara atas nama Aris, di Kabupaten terdaftar dalam Nomor 79 Pidsus Tahun 2019 yang kedua Nomor 65 dan 69. Perkara putusan ada pidana tambahan kebiri kimia ada di dalam perkara kabupaten.<sup>50</sup>

## **2. Putusan Hakim**

Majelis hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Pidana Pokok berupa Pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Penelitian ini menggunakan studi kasus putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto dalam Putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 Mei 2019 yang kemudian diperkuat di tingkat banding oleh Putusan PT Surabaya

---

<sup>49</sup><https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/27/fakta-kasus-aris-predator-anak-dijatuhi-hukuman-kebiri-kimia-minta-dihukum-mati-hingga-ajukan-pk?page=2> diakses pada 17 Januari 2020

<sup>50</sup><https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/26/kronologi-lengkap-kasus-aris-di-mojokerto-sampai-dihukum-kebiri-dulu-dijuluki-predator-anak?page=4> diakses pada 17 Januari 2020

dengan nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2019. Terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto, Muh Aris bin Syukur dijatuhi hukuman kebiri kimia oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Aris dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Ia juga dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan.<sup>51</sup> Hal ini dianggap sudah adil bagi para pihak dan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun orang lain yang berpotensi melakukan hal yang sama.

### **3. Pertimbangan Hakim secara Objektif dan Subjektif**

a. Pertimbangan secara objektif oleh hakim didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut:

#### **1) Perbuatan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat 7 Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi jenis Pemidanaan baru di Indonesia yaitu Pidana Kebiri yang termasuk dalam Pidana Tindakan. Pidana kebiri ini menjadi alternatif pidana terakhir (*ultimum remidium*) bagi pelaku pedofilia.

Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>51</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-semilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia> diakses pada 25 Desember 2019



Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, berbunyi :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Berdasarkan Pasal 81 ayat (5), maka dapat diketahui bahwa perbuatan perkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terpidana, telah memenuhi unsur-unsur tersebut, diantaranya sebagai berikut.

f) Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang

Berdasarkan keterangan pelaku, korban pemerkosaan ialah anak yang rata-rata berusia TK dengan total jumlah korban yakni sebanyak 9 anak. Perbuatan pemerkosaan ini dilakukan berkali-kali dengan korban yang berbeda-beda.

g) Mengalami luka berat

Dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Aris ini, korban mengalami kejadian yang traumatis, secara psikis akan mengalami kesakitan yang cukup berat dan berlangsung seumur hidup mereka.

#### h) Terganggunya fungsi reproduksi

Pemeriksaan terhadap anak di bawah umur tentunya akan menyebabkan terganggunya fungsi reproduksi karena adanya pemaksaan penetrasi secara seksual yang mengakibatkan korban mengalami pendarahan.

Berdasarkan Pasal 81 ayat (7) yang menyatakan: Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman pidana tambahan yakni berupa hukuman kebiri. Tindakan tersebut diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan yang disertai dengan rehabilitasi.

Mengenai pidana tambahan kebiri kimia tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam ketentuan Pasal 81 ayat 5 dan ayat 7 yang menyatakan bahwa, salah satunya lebih dari satu kali, ketentuan maksimal bisa ditambah dalam Undang-Undang. Ketentuan maksimal bisa

ditambah dalam Undang-Undang sehingga, Pasal 81 ancaman 15 tahun maksimal bisa sampai 20 tahun, seumur hidup maupun hukuman mati. Dalam Pasal 81 ayat 7 disitu apabila ketentuan Pasal 5 diberlakukan, maka bisa dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia. Dan hal tersebut dalam perkara ini, menurut majelis hakim PN Mojokerto yang mengadili perkara nomor 69 atas nama Muh Aris, unsur-unsur yang disebutkan tersebut telah terbukti oleh terdakwa.

## 2) Dakwaan Jaksa

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. merupakan perkara dengan putusan pidana tambahan kebiri kimia yang saat ini berada dalam perkara kabupaten. Jaksa mendakwakan untuk perkara kabupaten secara subsideritas primer Pasal 76 D, Pasal 81 Ayat 1 subsider 76 E Pasal 81 Ayat 1. Dalam dakwaannya, Aris melanggar ketentuan Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## b. Pertimbangan secara subjektif oleh hakim

Perbuatan terpidana kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh Aris merupakan perbuatan yang sangat keji lantaran sasaran korban Aris yang merupakan anak-anak di bawah umur, rata-rata berusia anak TK. Selain itu, perilaku biadab itu juga dilakukan atas

unsur paksaan yakni dengan membekap dan memperkosa korban. Pemerkosaan tersebut dilakukan berkali-kali hingga memakan 9 korban. Kejahatan tersebut dilakukan secara sadar oleh pelaku bahkan pelaku mengaku bahwa ia memang “sengaja” melakukan aksi pemerkosaan terhadap anak-anak karena ia tidak dapat menyalurkan hasratnya kepada wanita dewasa. Berdasarkan surat keterangan kesehatan jiwa dari penyidik Polres Mojokerto menerangkan bahwa Aris tidak memiliki gangguan jiwa, Aris dinyatakan sehat secara fisik dan jasmani. Berarti, hukuman tambahan kebiri kimia dapat dilakukan terhadap terpidana Aris karena dia dinyatakan sehat mental dan fisik.

Meninjau perbuatan terdakwa terhadap korban, tentunya akan menimbulkan dampak psikologis terlebih para korban adalah anak-anak yang masih dibawah umur. Sejatinya, anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan aset bangsa yang sangat berharga, sudah sepantasnya anak-anak mendapatkan perlindungan dan keadilan dari kekejian tindakan kejahatan seksual. Sedangkan dari segi sosiologis, kasus kejahatan seksual pada anak-anak menjadi isu yang paling banyak diperbincangkan dan momok yang menakutkan bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukuman kebiri ini merupakan pilihan terakhir bagi hakim yang menganggap putusan ini relevan dilakukan mengingat maraknya kasus-kasus kejahatan seksual pada anak di Indonesia, diharapkan

dengan adanya putusan ini akan memberikan efek jera bagi pelaku pedofilia dan pemulihan kepada pelaku pedofilia agar tidak mengulangi kejahatan yang sama. Demi memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, putusan pidana tambahan berupa kebiri kimia dinilai sebagai putusan terbaik PN Mojokerto.

### **C. Hambatan dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri**

#### **1. Undang-Undang Belum Mengatur tentang Petunjuk Teknis dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri**

Putusan Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. saat ini masih belum dapat dilaksanakan karena sampai saat ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Selain itu, putusan ini pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, tidak terkecuali para penegak hukum. Hukuman kebiri kimia untuk Aris akan menjadi yang pertama kali di Indonesia dan untuk eksekusinya sendiri.

#### **2. Penolakan (Kontra) terhadap Penerapan Hukuman Kebiri**

##### **a. Penolakan dari Komnas HAM**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta institusi hukum untuk menghentikan hukuman kebiri. Penerapan kebiri kimia sebagai penghukuman adalah pelanggaran HAM, hukuman dengan merusak kondisi fisik itu

dilarang.<sup>52</sup> Penerapan kebiri kimia sebagai penghukuman adalah pelanggaran HAM. Penolakan dari organisasi-organisasi HAM pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu; Pertama, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. Dan ketiga, segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysar akar permasalahan kekerasan terhadap anak. Karena itu, organisasi-organisasi HAM tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan anak secara komprehensif, dalam hal ini

---

<sup>52</sup><https://nasional.tempo.co/read/1274483/komnas-ham-minta-hukuman-kebiri-dihentikan/full&view=ok> Diakses pada 23 Desember 2019

sebagai korban, negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada anak korban.<sup>53</sup>

Pandangan Komnas HAM terkait hukuman kebiri yakni sebagai berikut.

- a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian hak tersebut merupakan yang bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen konstitusional pula. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula

---

<sup>53</sup>Nuzul Qur'aini, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 1, Maret, 2017, hlm. 10

dikualifikasi sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*).

- c. Masukkan dari para dokter, ahli hukum dan kriminolog menyatakan bahwa sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada Hak Asasi Manusia. Dengan demikian penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengebirian (castration) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Langkah pemberian hukuman melalui pengebirian tidak proporsional untuk menangani masalah dan menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.
- d. PERPPU tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual



terhadap anak-dalam hal ini juga perempuan-meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.

Komnas HAM juga mempertanyakan pengawasan atas pelaku kejahatan yang telah mendapat suntikan agar suntikan diberikan rutin. Masalah kejahatan seksual tidak sekadar masalah penetrasi alat kelamin, tapi terkait banyak hal seperti cara pandang.<sup>54</sup> Misalnya, dalam budaya patriaki anak dianggap sebagai properti. Sejalan itu maka upaya pencegahan perlu dilakukan secara masif seperti menggelar pendidikan pengenalan fungsi tubuh atau seks sejak dini. Sehingga anak mengetahui mana tindakan yang masuk pelecehan atau tidak. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan orang

---

<sup>54</sup>Komnas HAM, Komnas Ham Tolak Rancangan Perppu Kebiri, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c1a83847a44/komnas-ham-tolak-rancangan-perppukebiri>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017.

melakukan kejahatan seksual diantaranya psikologis, medis (fisik) dan sosial. Perppu Kebiri tidak bisa mengatasi persoalan itu karena tidak menuntaskan penyebab terjadinya kejahatan seksual. Penanganan terhadap kejahatan seksual harus ditempatkan dalam konteks yang menyeluruh. Misalnya, bagaimana secara sosial memposisikan anak dan perempuan sebagai subyek, bukan obyek. Setiap orang punya hak untuk mengetahui dan menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.

b. Penolakan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia)

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual harus mengacu peraturan yang berlaku dan harus diberikan pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial. Selain itu penerapan hukuman kebiri itu akan rumit implementasinya. Sebab dalam penjatuhan sanksi pidana eksekutornya kejaksaan, sedangkan kebiri adalah tindakan medis sehingga dibutuhkan peran dokter. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri kimia untuk tepidana pelecehan seksual. IDI secara tegas menyatakan sikap tidak bersedia mengeksekusi hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual. Dalam melakukan tindakan medis, dokter berpegang teguh pada kode etik kedokteran. Salah satu yang tertuang dalam kode etik kedokteran yakni dokter tidak

akan melakukan tindakan medis atas dasar hukuman. Dokter juga tidak akan melakukan tindakan medis yang dampaknya menurunkan derajat kesehatan fisik dan psikis. Secara medis, suntikan hormon dalam tubuh manusia akan berdampak pada fungsi tubuh yang lain.

Pengaturan hukuman kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan terobosan baru dalam bidang hukum dan menjadi bagian yang paling diperbincangkan. Hukuman kebiri tentunya akan membuat seseorang berpikir dua kali untuk melakukan perilaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sudah terlihat sejak bergulirnya wacana pemberlakuan hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat telah terjadi penurunan jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2015. Di Semester I (Januari-Juni) tahun 2015, kekerasan terhadap anak mencapai 105 kasus, namun di semester II (Juli-Desember) kekerasan seksual terhadap anak menurun menjadi 88 kasus. Ketua KPAI HM Asrorun Niam menjelaskan, turunnya angka kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan wacana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada waktu itu yang menyebabkan para pelaku menjadi takut untuk melancarkan aksinya.<sup>55</sup>

Hukuman kebiri tidak bermaksud untuk melanggar hak asasi manusia seseorang untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak untuk

---

<sup>55</sup><http://www.merdeka.com/peristiwa/wacana-perppu-kebiri-turunkan-angka-kekerasan-seksual-pada-anak.html> diakses pada 25 Desember 2019

berkeluarga dan melanjutkan keturunan dapat dibatasi oleh pemerintah dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penjatuhan hukuman kebiri adalah pilihan bagi hakim dan bukan kewajiban bagi hakim. Dalam Pasal 81 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman kebiri. Hal ini berarti hakim dapat untuk tidak menjatuhkan hukuman kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hakim diberikan wewenang untuk memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan kebijaksanaannya.

Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kebiri kepada setiap pelaku kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman kebiri sudah diatur sedemikian rupa agar hukuman kebiri tidak bisa asal dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pelaku tersebut termasuk dalam kategori pelaku yang dapat dikenakan hukuman kebiri, sehingga bila pelaku tersebut tidak termasuk dalam kategori ini, maka dia tidak bisa dikenakan hukuman kebiri.

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini terus berproses melangkah maju dan terus merumuskan berbagai formulasi sanksi yang tepat kepada para pelaku pencabulan anak di bawah umur, sanksi pidana kebiri kimiawi adalah salah satu upaya maksimal dalam memerangi kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang semestinya terhindar

dari perbuatan kejam tersebut, sanksi hukuman tambahan yang terdapat dalam pasal 82A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 yang adalah salah satu upaya maksimal dalam menanggulangi kejahatan pencabulan anak.<sup>56</sup>

Sistem pemberian pidana tambahan berupa kebiri hanya dilakukan untuk para pelaku kejahatan seksual dewasa. Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut masih anak-anak maka negara melalui Pasal 82 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan hukuman kebiri tidak berlaku. Pemberian hukuman terhadap anak-anak sebagai pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan melalui beberapa pasal yang lain yang ada dalam undang-undang perlindungan anak. Pengkhususan tersebut mengingat usia anak yang masih dibawah umur.<sup>57</sup>

Bagian dari teori absolute yang diterapkan di Indonesia adalah adanya asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP serta jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP. Sedangkan bagian dari teori relative yang diterapkan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem pemyarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.

---

<sup>56</sup> Angga Kurniawan, *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Tinjau Dari Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 7.

<sup>57</sup> Adam Yuriswanto dan Ahmad Mahyani, "Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Volume 14, Nomor 27, September, 2018, hlm.33.

Dikaitkan dengan wacana penerapan hukuman kebiri, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak karena kekerasan seksual pada anak atau pedophilia itu merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak menysasar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Namun sampai saat ini, pelaku tidak menjalani hukuman tambahan yaitu hukuman kebiri seperti yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto. Hal ini dikarenakan pihak eksekutor tidak bersedia untuk melakukan eksekusi atas pelaksanaan hukuman kebiri dengan alasan melanggar kode etik kedokteran. Sehingga pelaku sampai saat ini belum menjalankan hukuman kebiri. Meskipun undang-undang telah mengatur secara tegas tentang pengaturan hukuman kebiri, akan tetapi hal ini sulit direalisasikan karena masih terjadi pro kontra dikalangan masyarakat tentang esensi dari pelaksanaan hukuman kebiri. Terutama yang bersinggungan dengan hak asasi manusia itu sendiri.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Di Indonesia, pengaturan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi kebiri kimiawi melalui proses yang panjang dicantumkan pada pasal 81, pasal 82 dan pasal 81A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai hukuman tambahan dan itu bisa menjadi pilihan bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim sebagai pengadil di dalam persidangan untuk memberikan hukuman dengan tujuan efek jera untuk para pelaku, sanksi kebiri kimiawi di anggap sesuai dengan tujuan pemidanaan sanksi pidana merupakan salah satu cara yang di gunakan untuk mencapai tujuan diadakannya hukuman pidana.
2. Penerapan hukuman kebiri dalam Putusan Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. belum dapat dilaksanakan. Adapun yang menjadi hambatan ataupun kendala dalam pelaksanaan hukuman kebiri ialah belum adanya petunjuk teknis dalam Undang-Undang untuk mengeksekusi hukuman kebiri kimia. Selain itu, putusan hakim ini menuai berbagai penolakan (kontra) dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Komnas HAM.

## **B. Saran**

1. Perlunya sanksi tegas dan penerapan yang adil dalam pemberian sanksi hukuman kebiri bagi pelaku yang melanggar agar tercapainya penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang berisikan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimiawi yang mengakibatkan tidak berfungsinya alat kelamin secara seksual. Perlunya meningkatkan usaha-usaha dalam arti luas baik melalui pemidanaan maupun secara sosialisasi menyeluruh dan merata di seluruh wilayah sehingga masyarakat Indonesia baik di perkotaan dan pelosok desa pun mengerti akan sanksi ini karna Undang-Undang ini berlaku di seluruh wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, dan Perlunya kajian mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencari solusi yang tepat agar kontra yang sampai saat ini masih bergulir dapat segera terpecahkan.
2. Perlu dibentuk tim khusus dari Dokter Kepolisian (Dokpol) untuk pelaksanaan eksekusi terhadap kebiri serta revisi terhadap Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian untuk menambahkan kemampuan Kedokteran Kepolisian dan penambahan kewenangan Dokter Polisi sebagai eksekutor. Pemerintah dalam hal ini anggota dewan legislasi nasional perlu mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 atau melakukan perubahan terbaru terhadap undang-undang yang lama dengan melibatkan Ikatan Dokter Indonesia untuk menemukan solusi yang tepat agar kontra yang sampai saat ini masih bergulir dapat segera terpecahkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, B. N., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. ke-4. Jakarta: Kencana, 2014.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hiariej, E. O., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2012.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Tim Visi Yustitia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI NO. 23/2002 dan UU RI NO. 35/2014)*, Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 2016.

## **B. Peraturan-Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri sebagai pidana tambahan

## **C. Jurnal**

Adam Yuriswanto dan Ahmad Mahyani, "Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Volume 14, Nomor 27, September, 2018.

Angga Kurniawan, *Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Tinjau Dari Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 7.

Arini Fauziah Al haq, dkk., "Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia", *Jurnal FISIP-UNPAD*, Volume 2, Nomor 1, Maret, 2015.

Arliman, Laurensius S, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara", *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 1, Nomor 2, Maret, 2017.

Diesmy Humaira B, dkk., "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak", *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*

*Pusat Penelitian dan Layanan Psikologi*, Volume 12, Nomor 2, Agustus, 2015.

Kristiani, Ni Made Dwi, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”, *Jurnal Penelitian Fakultas Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar Bali*, Volume 7, Nomor 3, 2014.

L.H. Spalding, “Florida’s 1997 Chemical Castration Law: A Return to the Dark Ages.” *Florida State Law Review*, 1998, 25: 117-139.

Mardiya, Nuzul Qur’aini, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, *Jurnal Konstitusi Pusat P4TIK Mahkamah Konstitusi RI*, Volume 14, Nomor 1, Maret, 2017.

Maslihah, S.,”Play Therapy dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak”,*Jurnal Penelitian Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)*, Volume 1, Nomor 01, Februari, 2013.

Muhammad Andi Dirgantara, Syafruddin Kallo, dkk., “Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia”, *USU Law Journal*, Volume 5, Nomor 1, September, 2017.

Paat, Alfando, “Relevansi Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 5, Maret, 2017.

Ramdhani, Iqbal, “Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Volume 4, Nomor 1, 2017.

Tim Visi Yustitia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI NO. 23/2002 dan UU RI NO. 35/2014)*, Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 2016.

Wahyuni, F., “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (Jurnal Media Hukum)*, Volume 23, Nomor 1, Juni, 2016.

Yuriswanto, Adam, dan Ahmad Mahyani, “Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14 Nomor 27, Februari, 2018

#### D. Website

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-semilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia>  
diakses pada 25 Desember 2019
- <http://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh> diakses pada 14 November 2019
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3746/pelecehan-seks/>  
diakses pada 14 Januari 2020
- <https://jabar.tribunnews.com/2019/01/18/angka-kekerasan-terhadap-anak-selama-2018-meningkat-ada-pertambahan-sekitar-300-kasus> diakses pada : 14 Januari 2020
- <http://jateng.tribunnews.com/2016/05/17/apa-itu-hukum-kebiri-dan-apa-bedanya-kebiri-fisik-dan-kebiri-kimiawi-ini-penjelasan-penjelassannya?page=3>  
diakses pada 15 November 2019
- <http://mappifhui.org/2016/03/01/menguji-euforia-kebiri-catatan-kritis-atas-rencanakebijakankebiri-chemical-castration-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-anak-di-indonesia> diakses pada : 16 Oktober 2019
- <http://mckinneylaw.iu.edu/ihr/pdf/vol5p87.pdf> diakses pada 17 Oktober 2019
- <http://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html>. Diakses pada 22 November 2019
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/wacana-perppu-kebiri-turunkan-angka-kekerasan-seksual-pada-anak.html> diakses pada 25 Desember 2019
- [http://www.antaranews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm\\_source=related\\_news&utm\\_medium=related&utm\\_campaign=news](http://www.antaranews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news) diakses pada 24 November 2019
- <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpaitemukan-116-kasuskekerasan-seksual-terhadapanak>diakses pada 16 Oktober 2019
- <http://www.neulaw.org/blog/1034-class-blog/4070-mpa-a-the-chemical-castration-of-sex-offenders>. Diakses pada 25 November 2019
- [https://www.law.cornell.edu/constitution/eighth\\_amendment](https://www.law.cornell.edu/constitution/eighth_amendment) diakses pada 23 November 2019

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/27/fakta-kasus-aris-predator-anak-dijatuhi-hukuman-kebiri-kimia-minta-dihukum-mati-hingga-ajukan-pk?page=2> diakses pada 17 Januari 2020

<https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/26/kronologi-lengkap-kasus-aris-di-mojokerto-sampai-dihukum-kebiri-dulu-dijuluki-predator-anak?page=4> diakses pada 17 Januari 2020

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Adi Prassetiyo Widodo

NPM : 5116500007

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 29 Juli 1994

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Desa Bongkok Rt : 02 Rw : 01 Kec. Kramat Kab.  
Tegal

### **Riwayat Pendidikan:**

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1	SD Negeri Bongkok 01	2000	2006
2	SMP Negeri 2 Kramat	2006	2009
3	SMA Al Irsyad Tegal	2009	2012
4	S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	2016	2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Tegal, 17 Januari 2020

Hormat Saya,

Adi Prassetiyo Widodo